

Analisis Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Terhadap Transparansi Keuangan Usaha Kost di Kota Sukaharjo

Eko Widyanto Widodo¹ Indra Lila Kusuma² Suprihati³

Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia^{1,2,3}

Email: ekhowidyanto@gmail.com¹ lilasofyan79@gmail.com² suprihati4566@gmail.com³

Abstract

This study aims to analyze the influence of the implementation of financial accounting systems on financial transparency in small to medium-scale boarding house businesses in Sukaharjo City, using a quantitative research approach with a descriptive nature. The data collection technique involved distributing questionnaires to a sample of 88 respondents who are boarding house business owners in Sukaharjo City, as well as using observation sheets and documentation. Based on the analysis results, it can be concluded that the implementation of Financial Accounting Standards (SAK) has a positive and significant impact on financial transparency in the boarding house businesses in Sukoharjo. The implementation of SAK was found to partially affect financial transparency, thus confirming the hypothesis that such an effect exists. Furthermore, the analysis results show that the implementation of SAK can explain a significant portion of the variation in financial transparency, which amounts to 98.3%. Therefore, the implementation of SAK plays a crucial role in improving the financial transparency of boarding house businesses. However, there are other factors outside the variables studied that also contribute to financial transparency.

Keywords: Financial Accounting Standards, Financial Transparency, MSMEs



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2024, jumlah UMKM mencapai 66,5 juta unit dengan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 64,1% atau senilai Rp. 8.573,89 Triliun. Peran UMKM tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membantu pemerataan ekonomi di berbagai daerah, termasuk wilayah pedesaan dan pelosok, sehingga mengurangi kesenjangan ekonomi dan urbanisasi besar-besaran (Aprieni, dkk., 2024:189). Besarnya kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional tidak lepas dari peran aktif para pelaku usaha, khususnya pemilik yang memegang peranan dominan dalam pengelolaan bisnisnya. Peran pemilik UMKM sangat dominan dalam pengelolaan usahanya. Pemilik UMKM memiliki komitmen yang kuat terhadap bisnis yang dijalankannya. Keputusan yang disepakati dengan UMKM sepenuhnya berada di tangan pemilik. Oleh karena itu, pengguna harus dapat menghadapi dan menyelesaikan semua masalah yang muncul di UKM dengan mengembangkan cara pandang yang tepat terutama dalam aspek manajerial dan keuangan (Agustin, dkk., 2022:249). Salah satu tantangan utama yang dihadapi UMKM adalah pengelolaan keuangan yang belum optimal. Banyak pelaku UMKM masih menggunakan pencatatan manual dan belum menerapkan prinsip-prinsip dasar akuntansi, sehingga kesulitan dalam memantau kondisi keuangan usaha secara akurat dan mengambil keputusan bisnis yang tepat. Penerapan akuntansi yang baik menjadi kunci dalam membantu UMKM memperoleh informasi keuangan yang relevan, seperti kinerja usaha, perhitungan pajak, posisi dana, perubahan modal, serta arus kas masuk dan keluar (Noer Sasongko, 2019; Khadijah & Purba, 2021:53). Sepanjang UMKM menggunakan uang sebagai alat transaksi, maka akuntansi akan selalu dibutuhkan sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan.

Huda (2013) menyatakan jika pengetahuan akuntansi memiliki bagian besar untuk mengendalikan usaha saat ini. Pengetahuan akuntansi yang dimiliki pengusaha UMKM dapat bermanfaat untuk digunakan dalam bisnisnya. Pengetahuan akuntansi yang minim dapat membawa dampak yang buruk bagi usaha dan juga manajemen, sehingga pengusaha dapat menemukan kesulitan ketika menetapkan kebijakan apa yang harus mereka tetapkan (Jamil, dkk., 2022: 457) Sayangnya, persoalan di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua pelaku UMKM melakukan pengelolaan keuangan secara menyeluruh. Dari empat indikator utama pengelolaan keuangan, yaitu penyusunan anggaran, pencatatan, pelaporan, dan pengendalian, umumnya hanya tiga yang diterapkan oleh sebagian besar pelaku usaha. Padahal pengelolaan keuangan merupakan salah satu indikator yang harus diperhitungkan untuk menentukan berhasil atau tidaknya suatu usaha. Teori Manajemen Keuangan juga menekankan bahwa pengelolaan keuangan yang baik harus didasarkan pada prinsip transparansi, akurasi, dan efisiensi (Brigham & Houston, 2020; Fatiah dan Lubis, 2025:730). Selain itu, pengelolaan keuangan yang buruk membuat UMKM tidak dapat mengambil tindakan preventif untuk mencegah potensi penyalahgunaan dalam bisnis mereka. (Suryani,2018; Hervina, 2022:3. Menurut Khadijah dan Purba (2021:250). ketidakmampuan memahami dasar-dasar akuntansi pada pengelolaan keuangan menjadi faktor penghambat berkembangnya usaha secara berkelanjutan. Lebih lanjut, Fatwitawati (2018) menegaskan bahwa salah satu alasan pelaku UMKM kesulitan dalam menerapkan akuntansi adalah karena tidak tersedianya buku pegangan atau panduan praktis yang mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dasar tentang akuntansi. Akibatnya, banyak pelaku usaha merasa kesulitan untuk memulai atau konsisten menerapkan akuntansi dalam aktivitas bisnis mereka

Salah satu bentuk aktivitas bisnis yang berkembang pesat di berbagai wilayah, khususnya daerah perkotaan dan sekitar lingkungan kampus atau kawasan industri, adalah usaha kost-kostan Usaha kost-kostan juga termasuk dalam kategori UMKM apabila memenuhi kriteria aset, omzet, dan jumlah karyawan sesuai ketentuan pemerintah tercantum pada UU No. 20 Tahun 2008, seperti aset di bawah Rp 10 miliar dan omzet kurang dari Rp 2,5 miliar per tahun. Dalam perkembangannya, kos sekarang telah menjadi salah satu ladang bisnis yang banyak diminati, mulai dari kategori bisnis sampingan sampai kategori bisnis yang serius (profesional). Dikatakan demikian karena hanya memanfaatkan ruangan- ruangan dalam kamar-kamar yang kosong daripada tidak mempunyai nilai apapun (Atmawidjaja, 2022:12). Menariknya, fenomena perkembangan usaha kost-kostan ini juga terlihat jelas di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Sebagai daerah penyangga Kota Surakarta, Sukoharjo memiliki banyak kawasan pendidikan seperti Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), serta sejumlah kawasan industri dan pemukiman padat. Kondisi ini membuat kebutuhan akan tempat tinggal sementara seperti kost meningkat dari waktu ke waktu. Berdasarkan pengamatan awal dan informasi dari pelaku usaha lokal, bisnis kost-kostan di wilayah ini berkembang cukup pesat, khususnya di kecamatan Grogol, Kartasura, dan Baki. Menariknya, sebagian besar usaha ini dikelola langsung oleh pemiliknya, baik sebagai sumber penghasilan utama maupun sebagai usaha sampingan. Namun, dari hasil wawancara informal dan peninjauan langsung dengan beberapa pemilik usaha UMKM kost-kost, masih banyak pemilik kost yang belum menerapkan pencatatan keuangan secara rapi dan terstruktur. Sebagian besar hanya mengandalkan catatan manual yang sederhana, bahkan ada yang sepenuhnya bergantung pada ingatan.

Kondisi ini menunjukkan masih rendahnya kesadaran akan pentingnya akuntansi sebagai alat bantu dalam mengelola keuangan usaha. Hal inilah yang menjadi dasar penting bagi penelitian ini: untuk melihat sejauh mana penerapan sistem akuntansi keuangan dapat membantu meningkatkan transparansi keuangan dan mendukung pengelolaan usaha kost-

kostan agar lebih tertata dan berkelanjutan. Maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh antara penerapan sistem akuntansi keuangan terhadap transparansi keuangan pada usaha kost-kostan skala kecil hingga menengah di Kota Sukaharjo. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang beragam:

1. Khadijah dan Purba (2021): UMKM di Kota Batam umumnya telah melakukan perencanaan anggaran, pencatatan sederhana, dan pengendalian keuangan yang cukup, namun belum semuanya memahami dan melaksanakan pelaporan keuangan secara tepat.
2. Agustin dkk. (2022): UMKM Viloralove masih menghadapi masalah dalam pengelolaan keuangan karena pencatatan masih manual dan belum mengikuti prinsip akuntansi, disebabkan oleh minimnya pengetahuan pemilik dan pegawai tentang keuangan.
3. Inna dan Suarjanan (2024): Penerapan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan UMKM di Denpasar, namun implementasinya masih terbatas dan membutuhkan peningkatan pemahaman serta pendampingan.
4. Fathia dan Lubis (2025): Penerapan sistem akuntansi digital secara signifikan meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan keuangan UMKM di Kota Langsa, mendukung teori manajemen keuangan dan adopsi teknologi.
5. Mandag dkk. (2025): Sebagian besar UMKM alat tulis di Universitas Dr. Soetomo, Surabaya, masih menggunakan pencatatan manual dan belum menerapkan SAK secara optimal. Diperlukan pelatihan dan pendampingan agar pelaporan keuangan lebih transparan dan akuntabel.

Tinjauan Pustaka

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) merupakan pedoman yang mengatur bagaimana transaksi keuangan dicatat, diukur, dan disajikan dalam laporan keuangan. Permenkop No 2 Tahun 2024 adalah peraturan menteri koperasi dan UMKM yang disusun sebagai pedoman bagi koperasi dalam menyusun laporan keuangan dan menetapkan kebijakan akuntansi koperasi berdasarkan SAK yang berlaku di Indonesia. Pada tahun 2016, Ikatan akuntansi Indonesia (IAI) menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) yang diharapkan dapat membantu pelaku UMKM dalam menyusun laporan keuangannya dengan tepat tanpa harus terjebak dalam kerumitan Standar Akuntansi Keuangan yang ada saat ini. SAK EMKM merupakan standar akuntansi keuangan yang jauh lebih sederhana jika dibandingkan dengan SAK ETAP. Berdasarkan pedoman dari Ikatan Akuntan Indonesia (IAI, 2016), terdapat beberapa indikator penting dalam penerapan SAK EMKM:

1. Pelaku usaha diharapkan mampu melakukan pencatatan transaksi keuangan secara sistematis, yaitu mencatat seluruh arus kas masuk dan keluar berdasarkan bukti transaksi secara runtut dan konsisten
2. Pelaku usaha diharuskan menyusun laporan keuangan sederhana, setidaknya mencakup laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi, agar kondisi usaha dapat terpantau secara berkala.
3. Laporan keuangan tersebut disusun dengan istilah dan format yang sesuai dengan SAK EMKM, seperti penggunaan istilah aset, liabilitas, pendapatan, dan beban secara tepat.
4. Pelaku usaha perlu memisahkan antara keuangan pribadi dan keuangan usaha agar informasi keuangan yang disajikan tidak tercampur dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan bisnis.
5. Laporan yang disusun harus mengikuti prinsip-prinsip dasar dalam SAK EMKM, seperti relevansi, keandalan, dan penyajian jujur, meskipun tidak diwajibkan menggunakan estimasi atau pengukuran yang kompleks.

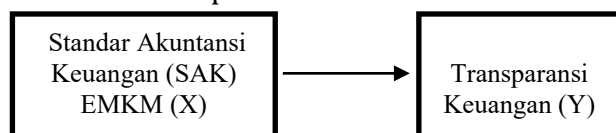
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dengan jelas menyebutkan bahwa transparansi adalah asas keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan mengakses seluas-luasnya informasi mengenai keuangan daerah. Transparansi menjamin akses atau kebebasan setiap orang dalam mengakses informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan, khususnya informasi mengenai kebijakan, proses perumusan dan pelaksanaan, serta hasil yang dicapai. UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 20 Tahun 2008 pada Bab 1, Pasal 1 dijelaskan bahwa yang dimaksud Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah adalah:

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini
2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini
3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan (UU No 20 Tahun 2008, Bab 2, Pasal 3).

Kerangka Pemikiran

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis dapat menggambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut:

H1 Variabel dependen



Gambar 1. Skema Kerangka Pikir

Sumber: Data diolah oleh Peneliti (2025)

Hipotesis

H0 : Penerapan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) tidak berpengaruh terhadap Transparansi Keuangan pada usaha kost-kostan di Kota Sukaharjo.

H1: Penerapan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) berpengaruh terhadap Transparansi Keuangan pada usaha kost-kostan di Kota Sukaharjo.

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Creswell (2015) menyebutkan bahwa populasi merupakan sekelompok individu yang memiliki karakteristik yang sama. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemilik usaha kost-kostan di Kecamatan Kartasura yang berjumlah ± 764 unit usaha berdasarkan data dari

platform Mamikos tahun 2025. Untuk memperoleh hasil penelitian yang representatif dan reliabel, peneliti menggunakan rumus Slovin dalam menentukan jumlah sampel.

Maka, jumlah sampel dihitung sebagai berikut:

$$n = \frac{764}{1 + 764 \cdot (0,1)^2} = \frac{764}{1 + 7,64} = \frac{764}{8,64} \approx 88,43$$

Dibulatkan, jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 88 responden.

Data Penelitian

Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini menggunakan beberapa jenis instrument untuk memperoleh data, yaitu kuesioner, lembar observasi, dan dokumentasi.

1. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan sejumlah pertanyaan tertulis secara terstruktur kepada responden penelitian berkaitan dengan tanggapannya terhadap berbagai variabel yang diteliti dalam penelitian ini.
2. Observasi adalah metode ini digunakan untuk memperoleh data dengan melakukan pengamatan langsung pada lokasi penelitian, kemudian membuat pencatatan untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas dan memberikan petunjuk-petunjuk untuk mendukung data yang diolah lebih lanjut.
3. Dokumentasi adalah segala bentuk catatan mengenai peristiwa yang telah terjadi di masa lalu, baik yang berbentuk tulisan seperti catatan harian, biografi, arsip sejarah, maupun non-tulisan seperti rekaman suara, foto, dan video (Sugiyono, 2016).

Variabel Penelitian

Adapun variabel penelitian ini adalah:

- a. Variabel bebas (*independent variable*) adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel terikat (*dependent variabel*). Dalam penelitian ini yang merupakan variabel bebas yang digunakan oleh penulis yaitu Sistem Akuntansi Keuangan (X).
- b. Variabel terikat (*dependent variable*) adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat adanya variabel bebas. Variabel terikat yang digunakan pada penelitian ini yaitu transparansi keuangan (Y).

Metode Analisis Data

1. Uji Kelayakan Instrumen Kuesioner
 - a. Uji Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan sesuatu instrumen. Suatu instrumen yang valid atau sahih mempunyai validitas tinggi, dan sebaliknya. Uji validitas dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel untuk tingkat signifikansi 5 persen dari degree of freedom (df) = $n-2$ dalam hal ini n adalah jumlah sampel. Jika r hitung $>$ r tabel maka pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan valid, demikian sebaliknya bila r hitung $<$ r tabel maka pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan tidak valid (Ghozali, 2012).
 - b. Uji Reabilitas menunjukan suatu pengertian bahwa suatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpulan data karena instrumen tersebut sudah baik.
2. Uji Normalitas. Pengujian normalitas data pada penelitian ini menggunakan uji Kolmogorov Smirnov^a dengan menggunakan bantuan program SPSS versi 25 dengan taraf signifikansi 5%, Kriteria pengujian ini dilakukan dengan membandingkan harga Chi Kuadrat hitung dengan harga tabel. Bila harga Chi Kuadrat hitung lebih kecil atau sama

dengan Chi Kuadrat ($H_h^2 \leq X_t^2$), maka distribusi dinyatakan normal, dan apabila lebih besar ($\leq$) dinyatakan tidak normal.

3. Uji Heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model Regresi yang baik adalah Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas (Ghozali, 2012).
4. Uji Linearitas. Pengujian linearitas antara variable bebas X yaitu Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dengan variable terikat Y yakni Transparansi Keuangan menggunakan software IBM SPSS di mana apabila telah diketahui angka uji linearitas maka penentuannya menggunakan dasar pengambilan keputusan. Jika nilai signifikansi (Sig.) pada baris *Deviation from Linearity* $> 0,05$, maka hubungan antara variabel X dan Y dinyatakan linier.
5. Uji Hipotesis. Metode regresi linear sederhana ini digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh dari masing-masing variabel independent baik secara bersama-sama maupun secara individual terhadap variabel dependen. Menurut Algifari (1997) Adapun persamaan regresi linier sederhana adalah sebagai berikut:
$$Y = a + bX$$

Keterangan :
Y : Transparansi Keuangan
X: Sistem Akuntansi Keuangan
a : Konstanta
b : Koefisien regresi untuk masing-masing Akuntansi
6. Uji t. Uji t digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh antara variabel X dan Y, apakah variabel X (Sistem Akuntansi Keuangan) benar-benar berpengaruh terhadap variabel Y (Transparansi Keuangan) secara terpisah atau parsial (Ghozali, 2011). Untuk menguji pengaruh antara variabel independen dan dependen menggunakan uji t, langkah pertama adalah menentukan nilai t tabel dengan tingkat signifikansi 5% atau 10% yang dibagi dua ($\alpha/2 = 0,025/0,50$) dan derajat kebebasan (df) yang dihitung dengan rumus $df = n - k - 1$, di mana n adalah jumlah sampel dan k adalah jumlah variabel independen. Setelah t tabel dihitung, langkah selanjutnya adalah menentukan nilai *t hitung*, yang diperoleh dari output SPSS pada tabel regresi.
7. Koefisien Determinasi (R^2). Uji Koefisien Determinasi (R^2) adalah suatu ukuran statistik dalam analisis regresi yang digunakan untuk menjelaskan seberapa besar kemampuan model regresi dalam menjelaskan variasi variabel dependen (Y) berdasarkan variabel independen (X). Dengan kata lain, R^2 menunjukkan tingkat kontribusi variabel X dalam mempengaruhi variabel Y dalam model regresi.

Nilai R^2 berkisar antara 0 hingga 1. Jika nilai R^2 adalah 0, ini berarti model regresi tidak mampu menjelaskan variasi pada variabel dependen sama sekali, sehingga variabel independen tidak memberikan kontribusi apapun terhadap perubahan dalam variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai R^2 mendekati 1, ini menunjukkan bahwa model sangat baik dalam menjelaskan variasi dalam variabel dependen, dengan kata lain, hampir semua variasi pada Y dapat dijelaskan oleh X. Jika nilai R^2 berada di antara 0 dan 1, ini berarti sebagian variasi Y dapat dijelaskan oleh X, namun masih ada faktor lain yang memengaruhi variabel dependen yang tidak tercakup dalam model tersebut. Oleh karena itu, nilai R^2 yang lebih tinggi menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan lebih baik dalam memprediksi atau menjelaskan hubungan antara X dan Y.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai tanggapan responden terhadap variabel dalam penelitian ini, yaitu penerapan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) sebagai variabel X dan transparansi keuangan usaha kost sebagai variabel Y. Pengukuran dilakukan melalui penyebaran angket dengan skala Likert terhadap 88 responden pelaku usaha kost di Kota Sukoharjo. Berikut ini adalah uraian data tabel distribusi dan persentase responden berdasarkan jenis kelamin, usia, dan lama usaha kost-kost di Kota Sukoharjo.

Tabel 1. Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
Laki-Laki	40	45%
Perempuan	48	55%
Total	88	100%

Sumber: Olah Data Angket (2025)

Tabel 2. Distribusi Responden Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah	Persentase (%)
< 30 tahun	10	11%
31 – 40 tahun	25	28%
41 – 50 tahun	30	34%
> 50 tahun	23	26%
Total	88	100%

Sumber: Olah Data Angket (2025)

Tabel 3. Distribusi Responden Berdasarkan Lama Usaha

Lama Usaha	Jumlah	Persentase (%)
< 1 tahun	5	6%
1 – 3 tahun	23	26%
4 – 6 tahun	28	32%
> 6 tahun	32	36%
Total	88	100%

Sumber: Olah Data Angket (2025)

Tabel di atas menunjukkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini adalah perempuan (54,5%) dibandingkan laki-laki (45,5%) dan mayoritas responden dalam penelitian ini adalah berusia 41 – 50 tahun (34%) dengan mayoritas responden telah menjalankan usaha kost lebih dari 6 tahun (36,4%) dan antara 4–6 tahun (31,8%). Adapun masing-masing variabel diukur melalui 20 butir pernyataan. Hasil dari statistik deskriptif ini ditampilkan dalam bentuk distribusi skor, kategori, frekuensi, dan persentase guna menginterpretasikan tingkat penerapan SAK dan transparansi keuangan yang diterapkan oleh para pelaku usaha kost.

Tabel 4. Distribusi dan Presentase Penerapan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) oleh Para Pelaku Usaha Kost di Kota Sukoharjo

No	Interval Skor	Kategori	Frekuensi	Presentase
1	20 – 35	Tidak Baik	0	0
2	36 – 51	Kurang Baik	10	10%
3	52 – 67	Cukup Baik	71	81%
4	68 – 83	Baik	7	9%
5	84 – 100	Sangat Baik	0	0
Jumlah			88	100%

Sumber: Hasil Olah Data Angket (2025)

Hasil distribusi frekuensi menunjukkan bahwa mayoritas responden berada pada kategori cukup baik, yaitu sebanyak 81% responden, diikuti oleh 10% responden yang berada pada kategori kurang baik, serta sebagian kecil berada pada kategori baik dengan presentase 7%, sedangkan kategori sangat baik belum mendominasi. Temuan ini mengindikasikan bahwa penerapan prinsip-prinsip dasar dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) oleh pelaku usaha kost di Kota Sukoharjo masih berada pada tingkat cukup optimal.

Tabel 5. Distribusi dan Presentase Transparansi Keuangan Para Pelaku Usaha Kost di Kota Sukoharjo

No	Interval Skor	Kategori	Frekuensi	Presentase
1	20 – 35	Tidak Baik	0	0
2	36 – 51	Kurang Baik	8	6%
3	52 – 67	Cukup Baik	65	77%
4	68 – 83	Baik	15	17%
5	84 – 100	Sangat Baik	0	0
Jumlah			88	100%

Sumber: Hasil Olah Data Angket (2025)

Hasil distribusi frekuensi menunjukkan bahwa mayoritas responden berada pada kategori cukup baik, yaitu sebanyak 81% responden, diikuti oleh 10% responden yang berada pada kategori kurang baik, serta sebagian kecil berada pada kategori baik dengan presentase 7%, sedangkan kategori sangat baik belum mendominasi. Temuan ini mengindikasikan bahwa penerapan prinsip-prinsip dasar dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) oleh pelaku usaha kost di Kota Sukoharjo masih berada pada tingkat cukup optimal.

Hasil Pengajuan Asumsi Klasik Uji Validitas

Tabel 6. Uji Validitas

Penyataan	r Hitung	r Tabel	Ket.
X1	0,43294866	0,361	Valid
X2	0,4489882	0,361	Valid
X3	0,416429	0,361	Valid
X4	0,63740895	0,361	Valid
X5	0,50080293	0,361	Valid
X6	0,52822141	0,361	Valid
X7	0,66351362	0,361	Valid
X8	0,65575191	0,361	Valid
X9	0,65575191	0,361	Valid
X10	0,4489882	0,361	Valid
X11	0,416429	0,361	Valid
X12	0,5487153	0,361	Valid
X13	0,433804	0,361	Valid
X14	0,429211	0,361	Valid
X15	0,793336	0,361	Valid
X16	0,717525	0,361	Valid
X17	0,813309	0,361	Valid
X18	0,56818	0,361	Valid
X19	0,624859	0,361	Valid
X20	0,806626	0,361	Valid
Y1	0,609446	0,361	Valid
Y2	0,484277	0,361	Valid
Y3	0,534896	0,361	Valid

Y4	0,643133	0,361	Valid
Y5	0,567688	0,361	Valid
Y6	0,421857	0,361	Valid
Y7	0,593237	0,361	Valid
Y8	0,645504	0,361	Valid
Y9	0,677103	0,361	Valid
Y10	0,4441	0,361	Valid
Y11	0,396554	0,361	Valid
Y12	0,706861	0,361	Valid
Y13	0,652132	0,361	Valid
Y14	0,424358	0,361	Valid
Y15	0,652132	0,361	Valid
Y16	0,60217	0,361	Valid
Y17	0,597678	0,361	Valid
Y18	0,427849	0,361	Valid
Y19	0,573537	0,361	Valid
Y20	0,6425354	0,361	Valid

Sumber: Hasil Olah Data SPSS Oleh Penulis (2025)

Uji Realibilitas

Tabel 7. Uji Realibilitas

Pertanyaan	Cronbach's Alpha	Keterangan
Standar Akuntansi Keuangan	0,730	Reliabel
Transparansi Keuangan	0,784	Reliabel

Sumber: Hasil Olah Data SPSS Oleh Penulis (2025)

Tabel di atas menunjukkan bahwa semua variabel pada penelitian ini reliabel dimana nilai Cronbach's Alpha lebih besar dari 0,6 yaitu: 0,730 dan 0,784. Sehingga jawaban dari responden reliabel dalam penelitian.

Uji Normalitas

Tabel 8. Uji Normalitas Data

Tests of Normality						
	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Standar Akuntansi Keuangan (SAK)	.074	88	.200*	.987	88	.564
Transparansi Keuangan	.083	88	.187	.981	88	.220

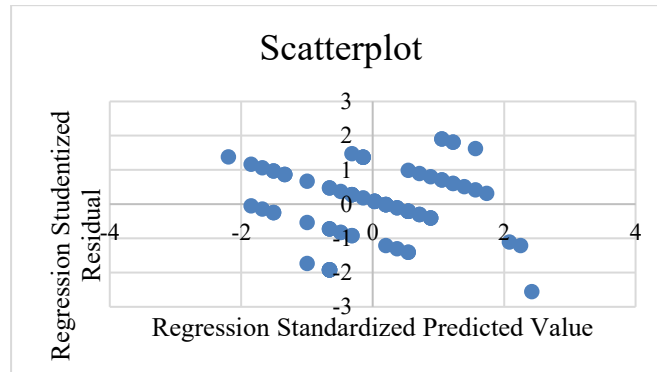
*. This is a lower bound of the true significance.

a. Lilliefors Significance Correction

Sumber: Hasil Olah Data SPSS Oleh Penulis (2025)

Berdasarkan hasil output SPSS, diperoleh nilai signifikansi (Asymp. Sig.) 0,564 dan 0,220 lebih dari 0,05 untuk kedua variabel. Hal ini menunjukkan bahwa data residual dari variabel X dan Y terdistribusi normal, karena tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara distribusi data dengan distribusi normal. Nilai ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara distribusi data residual dengan distribusi normal.

Uji Heteroskedastisitas



Gambar 2. Grafik Output Scatterplot

Berdasarkan hasil *output scatterplot* dalam penelitian ini, terlihat bahwa titik-titik residual menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu, baik pola mengerucut (*cone*) maupun menyebar melebar pada bagian tertentu. Sebaran titik cenderung merata di atas dan di bawah sumbu nol, dan tidak menunjukkan pola linier, kurva, atau simetris yang dapat menunjukkan adanya heteroskedastisitas.

Uji Linearitas

Tabel 9. Uji Linearitas

ANOVA Table			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Transparansi Keuangan * Standar Akuntansi Keuangan (SAK)	Between Groups	(Combined)	3518.521	23	152.979	417.191	.000
		Linearity	3481.019	1	3481.019	9493.119	.000
		Deviation from Linearity	37.502	22	1.705	.732	.687
	Within Groups		23.468	64	.367		
	Total		3541.989	87			

Sumber: Hasil Olah Data SPSS Oleh Penulis (2025)

Berdasarkan hasil uji linearitas yang dilakukan, diperoleh nilai signifikansi (Sig.) 0,687 sebesar lebih dari 0,05 pada baris *Deviation from Linearity*, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini memenuhi asumsi linearitas, yang berarti model regresi linear sederhana yang digunakan layak dan valid untuk digunakan dalam menganalisis hubungan antara variabel Penerapan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan variabel Y (Transparansi Keuangan Usaha Kost). Berdasarkan Nilai F dari output di atas, diperoleh nilai F hitung 0,732 < F tabel 3,96 (df1=1, df2= 86, $\alpha=0,05$). Karena nilai F hitung lebih kecil dari nilai F tabel maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan linear secara signifikan antara Penerapan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan variabel Y (Transparansi Keuangan Usaha Kost).

Uji t

Tabel 10. Uji t Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-3.917	.927	-4.224	<.001
	X	1.081	.015	70.072	<.001

a. Dependent Variable: Transparansi Keuangan

Sumber: Hasil Olah Data SPSS Oleh Penulis (2025)

Berdasarkan hasil pengujian di atas, ditemukan bahwa koefisien regresi variabel penerapan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) sebesar 1.081 dengan nilai signifikansi kurang dari 0.001 dan nilai t sebesar 70.072. Nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0.05 menunjukkan bahwa pengaruh penerapan SAK terhadap transparansi keuangan usaha kost di Kota Sukoharjo adalah signifikan secara statistik. Dengan demikian, hipotesis nol (H_0) yang menyatakan bahwa “Variabel-variabel bebas (Sistem Akuntansi Keuangan) tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat (Transparansi Keuangan)” ditolak. Adapun hipotesis alternatif (H_1) yang menyatakan sebaliknya yakni “Variabel-variabel bebas (Sistem Akuntansi Keuangan) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat (Transparansi Keuangan)” diterima. Hal ini menandakan bahwa penerapan SAK secara positif dan signifikan memengaruhi transparansi keuangan pada pelaku usaha kost di Kota Sukoharjo. Selanjutnya, persamaan regresi yang diperoleh adalah $Y = -3.917 + 1.081X$, di mana *intercept* bernilai -3.917 dan koefisien regresi untuk variabel SAK sebesar 1.081. Koefisien positif tersebut mengindikasikan bahwa setiap peningkatan satu satuan dalam penerapan Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) akan meningkatkan transparansi keuangan sebesar 1.081 satuan. Meskipun *intercept* bernilai negatif, hal ini menunjukkan bahwa tanpa penerapan SAK, transparansi keuangan diprediksi sangat rendah, sehingga menegaskan pentingnya penerapan Sistem Akuntansi Keuangan dalam meningkatkan transparansi laporan keuangan pelaku usaha kost di Kota Sukoharjo.

Uji Koefisien Determinasi

Tabel 11. Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.991 ^a	.983	.983	.84199

a. Predictors: (Constant), Standar Akuntansi Keuangan

b. Dependent Variable: Transparansi Keuangan

Sumber: Hasil Olah Data SPSS Oleh Penulis (2025)

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi, diperoleh nilai R Square sebesar 0,983. Hal ini menunjukkan bahwa sebesar 98,3% variasi dalam transparansi keuangan pada usaha kost-kostan di Kota Sukoharjo dapat dijelaskan oleh variabel penerapan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Dengan kata lain, penerapan SAK memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap peningkatan transparansi keuangan. Sementara itu, sisanya sebesar 1,7% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar variabel yang diteliti, seperti tingkat literasi keuangan pemilik usaha, sistem pencatatan keuangan manual, atau penggunaan teknologi akuntansi. Nilai determinasi yang sangat tinggi ini mengindikasikan bahwa model regresi yang digunakan sangat baik dalam menjelaskan hubungan antara penerapan SAK dan transparansi keuangan, serta bahwa penerapan SAK merupakan faktor utama yang menentukan tingkat transparansi keuangan pada usaha kost-kostan di wilayah Kota Sukoharjo.

Pembahasan

Penelitian ini membuktikan bahwa penerapan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi keuangan pada usaha kost di Kota Sukoharjo. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat penerapan SAK, maka semakin transparan pengelolaan keuangan usaha tersebut. Temuan ini memperkuat peran penting SAK sebagai landasan utama dalam penyusunan laporan keuangan yang akurat, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan, bahkan dalam lingkup usaha mikro seperti usaha kost. Berdasarkan hasil uji statistik, mayoritas pelaku usaha kost menunjukkan tingkat

penerapan SAK dalam kategori cukup baik, yaitu sebesar 81%. Sebanyak 10% pelaku usaha berada pada kategori kurang baik, dan 7% menunjukkan penerapan yang baik. Sementara itu, belum terdapat pelaku usaha yang mencapai kategori sangat baik. Hal ini mengindikasikan bahwa masih terdapat ruang peningkatan dalam hal pemahaman dan implementasi prinsip-prinsip akuntansi secara lebih komprehensif, meskipun mayoritas sudah mulai menyadari pentingnya pencatatan keuangan.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Illahi (2021) yang menemukan bahwa sebagian besar pengusaha kos-kosan belum sepenuhnya menerapkan konsep dasar akuntansi, seperti pemisahan antara keuangan pribadi dan usaha serta pencatatan transaksi secara sistematis, yang berdampak pada rendahnya transparansi laporan keuangan. Demikian pula, Tangon, dkk. (2021) menunjukkan bahwa pencatatan keuangan masih sangat sederhana, tanpa pelaporan laba rugi yang terstruktur, meskipun ada upaya penerapan SAK. Penelitian Inna dan Suarjanan (2024) juga mendukung hasil ini dengan menunjukkan bahwa penerapan SAK memberikan dampak positif terhadap kinerja keuangan UMKM, meskipun implementasinya masih bergantung pada tingkat pemahaman pelaku usaha. Sementara itu, Fathia dan Lubis (2025) menegaskan pentingnya sistem akuntansi digital dalam memperkuat efisiensi dan transparansi, yang menunjukkan bahwa digitalisasi pencatatan keuangan merupakan alternatif strategis dalam mendorong implementasi akuntansi yang lebih akurat.

Penelitian terdahulu lainnya, seperti Agustin, dkk. (2022) dan Suryanti (2022), menekankan bahwa banyak pelaku UMKM belum optimal dalam mengelola keuangan akibat keterbatasan pemahaman terhadap prinsip-prinsip akuntansi. Hal ini diperkuat oleh temuan Aziz (2024) yang mencatat peningkatan signifikan dalam kualitas laporan keuangan setelah penerapan SAK EMKM di Toko Nur Rappang. Adapun Mandag, dkk. (2025) menekankan bahwa UMKM alat tulis di Surabaya masih menggunakan pencatatan manual sederhana dan belum sesuai dengan SAK. Mereka menyarankan perlunya pelatihan akuntansi bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian ini memberikan bukti bahwa meskipun belum seluruh pelaku usaha kost mampu menerapkan SAK secara menyeluruh, terdapat kesadaran dan arah positif menuju pencatatan keuangan yang lebih transparan. Keterbatasan dalam pemahaman dan praktik dapat diatasi melalui pendampingan, pelatihan, serta penyederhanaan format akuntansi sesuai karakteristik UMKM. Dengan demikian, implementasi SAK tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi menjadi fondasi bagi keberlanjutan dan kredibilitas usaha.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi keuangan pada usaha kost di Kota Sukoharjo. Variabel penerapan SAK terbukti secara parsial memengaruhi transparansi keuangan, sehingga hipotesis yang menyatakan adanya pengaruh tersebut diterima. Selain itu, hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan SAK mampu menjelaskan sebagian besar variasi transparansi keuangan, yakni sebesar 98,3%.

Keterbatasan

1. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini hanya terbatas pada penerapan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) sebagai variabel independen, sehingga faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi transparansi keuangan, seperti literasi keuangan pemilik usaha, penggunaan teknologi informasi, atau budaya organisasi, belum dimasukkan dalam model penelitian.

2. Sampel penelitian yang digunakan terbatas pada usaha kost di wilayah Kota Sukoharjo, sehingga hasil penelitian ini mungkin belum dapat digeneralisasi secara luas ke jenis usaha atau daerah lain dengan karakteristik yang berbeda.
3. Data yang digunakan merupakan data sekunder hasil pengolahan SPSS, sehingga potensi bias dalam pengumpulan data primer dari responden belum sepenuhnya teridentifikasi dan dikontrol.

Rekomendasi

1. Pelaku usaha kost disarankan untuk lebih mengoptimalkan penerapan SAK secara konsisten dalam pengelolaan laporan keuangan mereka. Penerapan standar akuntansi yang baik akan membantu meningkatkan keterbukaan dan akuntabilitas keuangan, sehingga kepercayaan penyewa dan *stakeholder* lainnya dapat terjaga.
2. Pihak terkait seperti pemerintah daerah, asosiasi usaha, dan lembaga pendukung usaha diharapkan dapat mengadakan pelatihan dan sosialisasi mengenai pentingnya penerapan SAK bagi pelaku usaha kost.
3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan variabel penelitian dengan memasukkan faktor-faktor lain yang berpotensi memengaruhi transparansi keuangan, seperti literasi keuangan, penggunaan teknologi informasi, dan budaya organisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, W., Maula, S. M., & Nirbita, B. N. (2020). Pengelolaan Keuangan Pada Usaha Kecil Mikro Menengah Di Kecamatan Manonjaya (Studi kasus pada UMKM Viloralove). *Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Siliwangi*, 3(2), 248-255.
- Atmawidjaja, H. S. (2022). *Entrepreneur: Dinamika sosial ekonomi bisnis kos di perkotaan*. UHAMKA Press.
- Azis, F. (2024). *Penerapan standar akuntansi keuangan EMKM terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan pada Toko Nur Rappang* (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Parepare).
- Creswell, J. W. (2015). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Farida, & Asyik, N. F. (2023). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Keuangan UMKM Dengan Biaya Operasional Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 12(8), 1-18.
- Hervina. (2022). *Analisis Pengelolaan Keuangan Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Takalar* (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar). Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2016). *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM)*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Jamil, S., Hidayat, D., & Hidayatulmunashiroh. (2022). Pengaruh Pengetahuan Akuntansi, Pengalaman Usaha Dan Motivasi Kerja Terhadap Persepsi Penggunaan Informasi Akuntansi Pada Pelaku UMKM di Pekanbaru. *Seminar Nasional Riset Ekonomi dan Bisnis 2022, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Lamongan (UNISLA)*, 454-467.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta: Kemendagri.

- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Koperasi*. Jakarta: Kemenkop UKM.
- Khadijah, & Purba, N. M. B. R. (2021). Analisis pengelolaan keuangan pada UMKM di Kota Batam. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 5(1). 51-59.
- Kristianten. (2006). *Transparansi Anggaran Pemerintah*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2005). *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Riahi, Ahmed. (2017). *Accounting Theory. Buku Kesatu*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryanti. (2022). *Pengaruh Tingkat Pendidikan, Skala Usaha, Pelatihan Akuntansi Dan Umur Usaha Terhadap Penggunaan Informasi Akuntansi Pada Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Studi pada bengkel di Kecamatan Binawidya dan Tuah Madani Kota Pekanbaru)* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau). Diakses dari <https://repository.uin-suska.ac.id/64321/>
- Suwardjono. (2018). *Teori Akuntansi Perekayasaan Pelaporan Keuangan, Edisi Ketiga*. Jakarta: BPFE
- Tangon, J. N., Sael, M. L., & Baso, R. F. (2021). Desain Aplikasi Laporan Keuangan Usaha Kos-Kosan Berdasarkan SAK EMKM Menggunakan Microsoft Access. *Jurnal Bisnis Terapan*, 5(1), 35-46.